

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi tahapan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang secara umum telah dilaksanakan sesuai regulasi, tetapi belum berjalan secara optimal di semua tahapan. Proses penyetaraan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu tahap usulan, tahap telaahan, tahap validasi, tahap penerbitan surat rekomendasi, serta tahap pengangkatan dan pelantikan. Pada tahap usulan hingga pengangkatan, mayoritas prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala terutama dalam penyesuaian struktur organisasi yang belum sepenuhnya diperbarui. Tahap validasi mengalami kendala karena antrean nasional yang menyebabkan keterlambatan. Meskipun surat rekomendasi dapat diterbitkan dengan cepat setelah validasi, dan pelantikan berjalan lancar sesuai prosedur, keterlambatan pada tahap-tahap sebelumnya berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

Faktor penghambat implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang antara lain yakni komunikasi yang belum optimal pada transmisi karena kendala jaringan saat sosialisasi secara daring dan pemahaman yang berbeda pada masing-masing PIC menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyampaian kebijakan. Dari aspek sumber daya terdapat keterbatasan jumlah pegawai yang menangani kebijakan penyetaraan jabatan, sistem informasi yakni SIASN yang masih terbatas

dan sering mengalami kendala teknis, serta koordinasi antarinstansi yang masih lemah akibat kurang maksimalnya sistem informasi. Faktor pendorong dari implementasi kebijakan penyetaraan ini adalah kualitas sumber daya manusia yang memadai dan sumber daya anggaran yang mencukupi dalam menunjang penerapan penyetaraan jabatan. Dari aspek disposisi, komitmen pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan sudah kuat dengan langsung dijalankannya kebijakan. Dari aspek struktur birokrasi, prosedur yang ada sudah jelas dan mekanisme koordinasi terus diperbaiki.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki aspek komunikasi, perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antara instansi pengusul dan Kementerian PAN-RB, baik melalui media daring seperti Zoom maupun melalui penyampaian koreksi yang lebih jelas dan menyeluruh. Selain itu dengan peningkatan sosialisasi dan komunikasi dengan metode yang lebih interaktif seperti diskusi langsung dan sesi konsultasi bagi pegawai yang terdampak penyetaraan jabatan. Hal ini penting agar proses revisi dokumen tidak terjadi berulang kali dan tidak menimbulkan kebingungan.
2. Untuk memperbaiki lamanya antrean evaluasi dan validasi jabatan, dapat dengan optimalisasi proses validasi jabatan untuk mempercepat proses validasi dengan meningkatkan koordinasi antara Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Semarang dan KemenPAN-RB supaya tidak terjadi keterlambatan yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas pegawai. Selain itu juga dengan menyediakan mekanisme transparansi dalam evaluasi dan validasi jabatan agar pegawai dapat mengetahui tahapan yang sedang berjalan.

3. Untuk memperbaiki aspek struktur kelembagaan, pembaruan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perlu segera dilakukan setelah pelaksanaan penyetaraan jabatan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara struktur lama dengan kebijakan baru, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pegawai fungsional.
4. Peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami jabatan fungsional penting dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan, pelatihan, dan pendampingan agar transisi dari jabatan struktural ke fungsional tidak hanya formalitas tetapi juga membawa dampak positif terhadap kinerja.
5. Optimalisasi koordinasi internal antarunit di daerah, khususnya antara BKPP dan Bagian Organisasi, harus terus diperkuat agar seluruh tahapan dapat dijalankan dengan lebih sinkron dan efisien, khususnya dalam menyusun dokumen dan memproses pengangkatan.